

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asia Timur merupakan sebuah wilayah yang penting bagi tatanan global saat ini karena memiliki ekonomi yang bersifat dinamis dan berkembang secara stabil. Kawasan ini juga yang telah menikmati lebih dari tiga dekade tanpa adanya perang antarnegara yang mungkin akan terungkap dengan potensi konsekuensi global yang menghancurkan. Selain itu juga, kawasan Asia Timur ditandai oleh adanya tiga kekuatan besar, yaitu kembalinya kebangkitan Tiongkok, supremasi dan kekuatan AS, serta regenerasi kedudukan Jepang. Tiga hal tersebut sudah menjadi ciri yang utama dari sebuah perkembangan tatanan regional saat ini di kawasan Asia Timur (Yulianto, 2009, p. 1).

Keadaan di Asia Timur juga dipenuhi berbagai peristiwa yang bertentangan dan kejadian yang tidak diharapkan. Di samping perkembangan ekonomi yang dinamis, stabil, dan kondusif selama 10 tahun terakhir telah membuat negara-negara di kawasan menjadi lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kawasan ini juga memiliki potensi terhadap konflik, permusuhan dan pertentangan dikarenakan peninggalan bekas politik Perang Dingin yang masih membekas di hubungan internasional (Yulianto, 2009, p. 1).

Dengan begitu maka tak heran jika kepentingan negara-negara besar juga terancam. Beberapa tahun belakangan terdapat dinamika politik, dan keamanan

yang menjadikan Asia Timur masuk dalam pertimbangan strategis negara-negara di dunia. Ketakutan yang dialami akan berpusat pada transformasi yang tidak stabil terutama pada hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara besar dengan pengelompokan sejarah dan masing-masing menganggap mempunyai hak untuk hegemoni di Asia Timur.

Tantangan yang dihadapi Tiongkok adalah Amerika Serikat sebagai hegemoni kawasan dan dunia yang sedang berkuasa, selain itu juga ada isu lainnya yang tak kalah penting yaitu konflik di Semenanjung Korea. Pada perkembangannya, konflik regional yang terjadi di Semenanjung Korea ini terbilang konflik yang rumit dan juga mengundang perhatian dunia internasional termasuk sekutunya yang berasal dari beberapa negara berpengaruh besar, antara lain AS, Rusia, Tiongkok, dan Jepang (Mu'aqaffi, et al., 2018, p. 90).

Konflik Semenanjung Korea tidak lepas dari perang Korea antara dua kubu, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950-1953 yang diakhiri dengan gencatan senjata tanpa adanya kesepakatan perdamaian diantara keduanya secara resmi (Akhli, 2018, p. 259). Hingga saat ini dinamika konflik yang semakin memanas dengan kedua kubu yaitu Korea Selatan dan Korea Utara yang keduanya saling mengancam. Situasi keamanan yang belum kondusif hingga saat ini dikarenakan belum adanya kesepakatan perdamaian antara kedua Korea dan juga ketegangan yang diciptakan oleh satu sama lain dan intervensi berbagai negara besar yang belum menurunkan eksistensinya terhadap konflik Semenanjung Korea.

Dalam rentang waktu tertentu, Korea Utara telah menunjukkan kekejaman yang ekstrim dalam penggunaan senjata nuklirnya. Seperti kita ketahui bersama, dengan berbagai uji coba rudal mulai dari jarak pendek bahkan dari jarak jauh (seperti rudal balistik), adapun berbagai rudal yang diluncurkan oleh kapal selam, kemampuan senjata nuklir Korea Utara meningkat. Terhitung sejak tahun 2006, Korea Utara sudah menjalankan belasan uji coba nuklir, salah satunya uji coba hulu ledak nuklir yang disebut sebagai uji coba rudal balistik antarbenua jarak jauh yang dilakukan pada 2017 (Mazzar, et al., 2018, p. 4).

Di saat yang sama, Korea Selatan terus memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kekuatannya. Pada 2017, keduanya mengadakan latihan militer bersama dalam skala yang besar, mengirimkan beberapa jet tempur yang dimiliki AS dan sekitar 12.000 personel militer AS ke Korea Selatan. Selain itu, sebagai tanggapan atas operasi nuklir Korea Utara, Amerika Serikat berupaya membangun sistem pertahanan area ketinggian tinggi termal atau yang dikenal dengan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan. Namun, Tiongkok mengkritik perkembangan THAAD karena diyakini memperburuk kondisi konflik di Semenanjung Korea, yang dapat memicu perang (Mu'aqaffi, et al., 2018, p. 88).

Wilayah di Semenanjung Korea tetap menjadi perhatian konflik dan tantangan terhadap keamanan yang terus berlangsung. Kedua Korea sepakat mengakhiri perang Korea pada tahun 1953, namun setelah itu ketegangan diantara keduanya tidak kunjung usai. Meskipun tidak selalu terlibat pada gencatan senjata, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit percikan yang dilakukan antara kedua

Korea saja dapat berpotensi menciptakan ketegangan. Hal ini ditandai dengan pecahnya wilayah Korea yang membentuk Korea Utara dan Korea Selatan serta belum adanya perjanjian perdamaian sampai tibanya di tahun 2018. Pada tahun ini bisa dibilang tahun yang bersejarah karena kedua Korea memutuskan untuk bekerja sama dan memulai era yang baru termasuk isu denuklirisasi yang dikenal sebagai deklarasi Panmunjom. Namun, dari tahun 2018 hingga Juni 2020 selalu diiringi oleh ketegangan antara keduanya. Keberadaan nuklir Korea Utara sebagai rezim pemerintahannya dan juga negara yang cenderung menutup diri. Selain itu juga ada Korea Selatan yang demokratis belum menyimpulkan perjanjian damai untuk mengakhiri secara resmi setelah perang Korea 1950-1953 (Muhamad, 2016, p. 127).

Kondisi yang dijelaskan diatas membuat masyarakat internasional merasa risih, salah satunya akibat dari pelaksanaan uji coba pengembangan nuklir yang dikerahkan Korea Utara dalam waktu dekat dan terus menerus. Banyak pihak yang menyesali akan hal tersebut salah satunya Indonesia. Dikarenakan uji coba nuklir bukanlah tindakan yang sepemikiran dengan semangat bersama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia yang bebas nuklir (Muhamad, 2016, p. 122).

Ketegangan antar Korea tersebut bisa menjadi ancaman serta tantangan yang sangat kompleks di masa mendatang. Hal ini dapat membahayakan keamanan pada regional Asia Timur dan Asia Tenggara karena dapat berpotensi menjadi konflik yang terbuka. Maka dari itu, dialog perdamaian harus diupayakan dari dukungan pihak-pihak yang terlibat ataupun tidak terlibat secara bersama-sama.

Disamping kondisi yang tidak kondusif itu adanya hubungan Indonesia dengan Korea Utara sungguh terjalin dengan baik sejak sekitar tahun 1960. Meskipun Korea Utara dikenakan beberapa sanksi internasional dari Dewan Keamanan PBB, tetapi Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya. Indonesia yang menjunjung prinsip perdamaian dunia, secara terbuka mempertahankan posisinya atas denuklirisasi dan telah menolak secara tegas terkait uji coba nuklir yang terus dilakukan Korea Selatan hingga saat ini. Indonesia menggunakan hubungan erat dengan Korea Utara untuk berupaya menjaga perdamaian, keamanan serta stabilitas di Semenanjung Korea melalui berbagai jalur diplomasi dan negosiasi (Desyana & Rizky, 2018).

Dalam konteks perdamaian, Indonesia dan Korea Selatan juga telah memperkuat kerja sama regional dan global. Kedua pihak sepakat untuk mendesak Korea Utara mematuhi resolusi PBB tentang denuklirisasi semenanjung Korea dan melakukan dialog damai serta upaya lainnya (Stefanie, 2017). Indonesia juga mendukung dialog kedua negara terkait isu reunifikasi Korea Utara (Rulita, 2019, p. 77).

Dari kedekatan hubungan Indonesia dengan kedua Korea, maka Indonesia dapat mengambil sikap mengenai konflik di Semenanjung Korea. Meskipun, secara geografis memang tidak berbatasan antara darat dan laut dengan Semenanjung Korea, tetapi situasi yang terjadi kian memanas dapat memunculkan kemungkinan adanya perang terbuka dan akan memberi dampak bagi Indonesia yaitu penurunan tingkat ekonomi Indonesia yang akan menurun, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tingkat

global pastinya akan menurun. Kegiatan ekonomi Indonesia akan terganggu karena Korea Selatan sendiri adalah investor terbesar di Indonesia. Korea Selatan juga termasuk ke dalam jajaran 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia. Maka, jika terjadi perang akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia (Setiaji, 2018).

Total perdagangan Indonesia dan Korea Utara mencapai US\$ 342,9 ribu, sedangkan hubungan sejak 2014 hingga 2019 telah membuat Indonesia mengalami ketidakseimbangan perdagangan dibidang nonmigas secara signifikan dan ekspor impor gas. Jelas, Indonesia masih defisit sebesar US\$ 2,676,3 juta. Di tahun 2019, dibandingkan dengan total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan telah mencapai US\$ 10.535,04 juta, bahkan Indonesia juga masih defisit non migas dan gas sebesar US\$ 597.218,2 ribu (Manurung, 2020, p. 234).

Dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia tidak bisa tinggal diam. Politik internasional Indonesia ke depan akan ditandai dengan berbagai perkembangan dan tantangan baru bukan hanya karena dunia akan semakin mengglobal dan liberal, tetapi juga karena Indonesia akan dihadapkan pada perkembangan ekonomi politik internasional. Dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari kebijakan nasional secara keseluruhan. Artinya, penting bagi pemerintah untuk mengusahakan hubungan internasional sedemikian rupa untuk mendukung kesejahteraan dan keamanan rakyatnya, termasuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 (Kristiyanto, et al., 2021).

Indonesia menganut dasar kebijakan luar negeri yaitu bebas dan aktif, sesuai dengan yang dimandatkan oleh Wakil Presiden RI Mohammad Hatta sejak tanggal 2 September 1948. Bebas aktif yang dimaksudkan adalah tidak memihak atau tidak cenderung lebih memilih satu aktor yang terlibat saja, tetapi juga turut mendukung terhadap pihak yang terlibat. Serta berusaha untuk menjaga kerja sama dan yang paling penting mengupayakan perdamaian dan memeredam ketegangan antara dua pihak yang bertentangan (Kristiyanto, et al., 2021).

Keikutsertaan Indonesia khususnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mediasi upaya perdamaian konflik di Semenanjung Korea adalah berusaha untuk menengahi permasalahan yang dihadapi oleh kedua Korea dengan bersikap netral atau tidak memihak siapapun dalam menyelesaikannya. Dalam proses perdamaian perlu adanya sikap melindungi kepentingan semua pihak yang bersangkutan secara adil untuk dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari para pihak yang berkonflik untuk menciptakan perdamaian dunia khususnya stabilitas keamanan di kawasan.

Melihat sejarah mengenai perjuangan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian sudah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Pyongyang dan mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Kim Jong-il dan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Kim Yong-nam. Saat itu Presiden Megawati menyampaikan pesan agar pemerintah Korea Utara membuka dialog dengan Korea Selatan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian kedua negara bagi reunifikasi bangsa Korea. Kunjungan Presiden Megawati terjadi saat sedang dalam kondisi

yang genting setelah Presiden AS saat itu George W. Bush secara konfrontatif menjadi Korea Utara dalam pidatonya sebagian dari ‘poros kejahatan’ yang mendukung terorisme global dan mencari senjata pemusnah massal (Why Indonesia Loves North Korea, 2018).

Selanjutnya, upaya tersebut dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2010, Presiden SBY menunjukkan keprihatinannya terhadap konflik yang sedang memanas diakibatkan oleh tembakan serangan militer artileri Korea Utara, beliau menyampaikan bahwa serangan tersebut berdampak luas hingga ke negara di sekitar kawasan dan dapat menewaskan korban jiwa. Presiden SBY berharap bahwa konflik ini dapat dicegah oleh Dewan Keamanan PBB agar tidak menjadi konflik terbuka dan perang berkelanjutan. Pembicaraan mengenai konflik ini bisa dibawa ke pertemuan puncak Asia Timur 2011 dengan agenda dialog politik keamanan regional yang diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah dan dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan negara lainnya seperti Korea Selatan, Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Selandia Baru, dan Australia (Kompas, 2010). Berharap pada pertemuan tersebut konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan dapat membawa kesepakatan yang baik dan kedua negara dapat hidup dengan damai di Semenanjung Korea (Ukka, 2019). Namun nyatanya, hasil dari KTT XVII ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Juni 2011 tidak berfokus pada konflik di Semenanjung Korea melainkan lebih ke isu Laut Tiongkok Selatan (Pudjiastuti & Prayoga, 2015).

Meskipun pada masa pemerintahan Presiden SBY yang mengaplikasikan *outward-looking* dan mengedepankan diplomasi *soft power* (Widiatmaja & Albab, 2019) dan bersifat *high politics* (Situmorang, 2015) pada kebijakan luar negerinya, tetapi tidak banyak yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam upaya perdamaian konflik di Semenanjung Korea terlebih karena faktor saat itu eskalasi konflik masih belum memuncak dan perundingan perdamaian masih bersifat stagnan dan belum ada perkembangan. KTT antar Korea terakhir diselenggarakan saat itu adalah tahun 2007 (KBS World, 2020), kemudian pada tahun 2008 pergantian kepemimpinan Korea Selatan yang pada saat itu hubungan dengan Korea Utara cukup tidak selaras. Hingga ada tahun 2010 ada harapan untuk berunding karena pada tahun 2009 dilaporkan terdapat kontak rahasia di Singapura antara utusan dari kedua Korea untuk membicarakan penyelesaian KTT. Namun, hasilnya kedua belah pihak tidak menyetujui persyaratan untuk mengadakan pertemuan puncak (Youngkwan, 2011).

Berbagai upaya dikerahkan Indonesia dari tahun ke tahun hingga saat ini masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, walaupun kebijakan luar negeri Indonesia saat ini berorientasi pada *inward-looking* (Situmorang, 2015) atau lebih condong memikirkan permasalahan domestik, tetapi dampak dari konflik yang terjadi juga berakibat pada kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia tidak tinggal diam dan mengupayakan mendamaikan konflik yang dikaji melalui teori mediasi dimana dalam melakukan perannya Indonesia hanya mempunyai kewenangan sebatas memberikan saran. Pada hakikatnya mediator hanya bertugas menjaga serangkaian proses perdamaian yang dilakukan dalam

mediasi berjalan dengan sepenuhnya lancar dan tidak pula berwenang untuk menentukan isi persengketaan, hingga menghasilkan kesepakatan yang adil bagi pihak-pihak yang melakukan proses mediasi.

Hal tersebut dilakukan Indonesia untuk menekankan pada kerja sama sebagai unsur utamanya sebagai bentuk kepentingan nasional guna mencapai kemakmuran masyarakat. Kepentingan nasional terdiri dari aspek pertahanan, ekonomi, ketertiban dunia dan ideologi. Kepentingan nasional juga dapat digunakan sebagai pengelolaan konflik secara konstruktif pada hubungan dan pengembangan diri.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahannya bahwa hingga saat ini konflik di Semenanjung Korea belum mencapai kesepakatan damai secara resmi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk terciptanya perdamaian yang diawali dengan dialog. Agar terciptanya dialog, maka dibutuhkan dorongan dan dukungan dari pihak terlibat ataupun pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Indonesia salah satunya sebagai pihak yang tidak terlibat dapat mendukung terciptanya dialog perdamaian. Salah satu faktor Indonesia untuk mendorong upaya tersebut adalah faktor kepentingan nasional, dimana konflik ini sangat mempengaruhi segala aspek kepentingan nasional Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan strategi mediasi. Strategi mediasi sudah dilakukan Indonesia sejak terjalinnya hubungan antara Indonesia dengan kedua Korea hingga saat ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Penulis mengidentifikasi bagaimana

strategi mediasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik di Semenanjung Korea pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Penulis juga memahami terdapat urgensi dalam penelitian ini, yaitu konflik di Semenanjung Korea yang hingga saat ini belum adanya kesepakatan damai akan berpotensi pada konflik terbuka yang akan membahayakan keamanan regional. Konflik juga berdampak pada kepentingan nasional Indonesia khususnya dalam kurun waktu 2014-2019. Dari sini penulis beranggapan bahwa adanya strategi mediasi yang dilakukan Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 yang dijadikan urgensi bagi penulis.

Dari penelitian ini juga muncul asumsi dasar penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Asumsi pertama, dialog digunakan sebagai sarana yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang rumit. Asumsi kedua, mediasi dilakukan untuk mencapai upaya perdamaian daripada konflik yang begitu kompleks.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Merujuk dari latar belakang masalah yang sudah dituliskan oleh penulis diatas, terbentuknya pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan penelitian penulis, yaitu: “Bagaimana strategi mediasi Indonesia dalam menghadapi konflik Semenanjung Korea pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019?”

### **1.3 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada periode waktu tahun 2014-2019. Jadi, strategi mediasi yang sudah dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik Semenanjung Korea selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama 2014-2019. Alasan penulis mengambil batasan tersebut adalah dikarenakan konflik yang berdampak pada kepentingan Indonesia sangat terlihat dalam kurun waktu 2014-2019. Selain itu juga berbagai upaya aktif dilakukan Indonesia pada kurun waktu tersebut dalam upaya perdamaian.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bentuk strategi mediasi yang sudah dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik Semenanjung Korea selama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014-2019).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, diantaranya ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dengan penjelasan di bawah ini:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Dari manfaat teoritis penulis berharap penelitian ini dapat digunakan untuk, antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi mediasi Indonesia dan konflik di Semenanjung Korea pada pengembangan studi keilmuan hubungan internasional

2. Sebagai sumber-sumber informasi atau digunakan untuk referensi dari setiap fenomena-fenomena yang terjadi kepada peneliti selanjutnya yang membahas isu yang terkait penelitian ini.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan materi pendukung kepada penulis dan pembaca mengenai strategi mediasi konflik di Semenanjung Korea
2. Memberikan gambaran secara umum bagaimana strategi mediasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik yang terjadi di Semenanjung Korea.
3. Sebagai rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan terkait di Indonesia strategi mediasi mengenai upaya perdamaian konflik di Semenanjung Korea.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini dibagi kedalam lima bab serta tiap-tiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan bahasan dan ulasan yang diteliti.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tinjauan referensi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema yang penulis teliti, landasan teoritis yang berisi teori studi perdamaian dan konflik yang penulis ambil untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, landasan konseptual yang merupakan penjelasan dari konsep yang memiliki alur pemikiran yang menjelaskan keterkaitan teori, konsep dan permasalahan yang sedang penulis teliti.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III berisi metodologi deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, unit analisis data, teknik analisis, dan teknik keabsahan data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab IV ini berisi hasil analisa peneliti dari data yang menjadi temuan penulis. Data tersebut berupa hasil wawancara, studi literatur dan sumber lainnya, yang dihubungkan dengan teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena konflik Semenanjung Korea yang terjadi saat ini bagaimana Indonesia bersedia untuk mediasi dalam upaya perdamaian konflik Semenanjung Korea.

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini terdapat dua sub bab, antara lain kesimpulan hasil penelitian yang ditulis penulis serta saran dari hasil penelitian dan untuk penelitian selanjutnya.